ABSTRACT

The increasing of national development in the economic field, requires the availability of enormous funds for the smoothness and success full of the development. The disbursement of such funds necessarily requires a strong guarantee agency and is able to provide legal certainty as well as to overcome the risks that can occur in the terms of debt repayment. However, creditor is always hindered by defaults of debtor when to execute the security object directly with his own power through the execution parate institution. Therefore, the existence of the execution parate institution needs to be affirmed and to be enacted in Law Number 4 of 1996 on the mortgage act. In that context there are two issues, namely what is the problem faced by creditor through the execution parate institution in Law No. 4 of 1996 on mortgage act, and how the legal protection to the creditor by carryout the execution parate institution.

This research is about juridical normative research with the constitution approach (statute approach) and conceptual approach, and a case construction. The law materials is about primary and secondary law materials, and the techniques collected used is the literature study.

The results showed that a problems faced by the credtiro through the existence of the execution parate institution in Law Number 4 of 1996 on the mortgage act is a conflict of norm between article 6 and article 11 paragraph (2) point e in the Mortgage Act, so that the default of debtor seeks to keep the collateral object to not be executed directly and easily by creditor through the execution parate institution. The default of debtor also requires the execution of the guarantee object to be made when there is an authorized court decision. Meanwhile, the form of legal protection against creditor by executing the execution parate can be done by auction announcement about the sale plan of the debtor object to fulfill the principle of specialism. Then an execution auction is conducted through a court decision, and ultimately the auction of the execution of the object of guarantee of the mortgage act by the creditor through the execution parate institution to repayment of any debtor debt of default, as regulated in article 6 of Law No. 4 of 1996 on the mortgage act.

The suggestion is the existence of the execution parate institution in Law Number 4 of 1996 on the mortgage act is expected to be obeyed and implemented by every debtor. In addition, it is expected that there will be legal confirmation in the form of enforcement and provision of legal protection against creditor that the execution of a disputed guarantee object may occur through the execution parate institution pursuant to article 6 and article 14 paragraph (2) of the mortgage act. Thus, it will lead to a legal understanding of the legality of the execution of a parate of execution by creditor.

Keywords: existence, execution, parate, mortgage act

ABSTRAK

Pembangunan nasional yang semakin meningkat di bidang ekonomi, membutuhkan tersedianya dana yang sangat besar untuk kelancaran dan kesuksesan pembangunan tersebut. Penyaluran dana tersebut tentu saja memerlukan lembaga hak jaminan yang kuat dan mampu untuk memberi kepastian hukum sekaligus mengatasi resiko yang dapat terjadi dalam hal pelunasan utang debitor. Namun kreditor selalu dihalang-halangi oleh debitor wanprestasi ketika hendak mengeksekusi obyek jaminan secara langsung dengan kekuasaan sendiri melalui lembaga parate eksekusi. Oleh karena itu, eksistensi lembaga parate eksekusi perlu ditegaskan berlakunya dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan. Dalam konteks tersebut ada dua permasalahan yaitu apa problematika yang dihadapi kreditor melalui lembaga parate eksekusi dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, dan bagaimana perlindungan hukum terhadap debitor dengan dilaksanakannya parate eksekusi oleh kreditor.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, pendekatannya undang-undang, konseptual dan kasus. Bahan hukumnya, bahan hukum primer dan sekunder, dan teknik pengumpulan bahan hukumnya adalah studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa problematika yang dihadapi debitor melalui adanya lembaga parate eksekusi dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yaitu adanya konflik norma antara Pasal 6 dengan Pasal 11 ayat (2) huruf e dalam Undang-Undang Hak Tanggungan, sehingga debitor wanprestasi berusaha mempertahankan obyek jaminan untuk tidak dieksekusi secara langsung dan mudah oleh kreditor melalui lembaga parate eksekusi. Debitor wanprestasi pun menghendaki eksekusi obyek jaminan tersebut dapat dilakukan bila ada putusan pengadilan yang berwenang. Sementara itu, bentuk perlindungan hukum terhadap kreditor dengan dilaksanakannya parate eksekusi dapat dilakukan dengan cara melakukan pengumuman lelang tentang rencana penjualan obyek jaminan milik debitor untuk memenuhi asas spesialitas. Kemudian dilakukan lelang eksekusi melalui putusan pengadilan, dan pada akhirnya lelang eksekusi obyek jaminan Hak Tanggungan oleh kreditor melalui lembaga parate eksekusi untuk megambil pelunasan atas segala utang debitor wanprestasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan.

Sarannya, eksistensi lembaga parate eksekusi dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan diharapkan dapat ditaati dan dilaksanakan oleh setiap debitor. Selain itu, diharapkan adanya ketegasan hukum dalam bentuk penegakan dan pemberian perlindungan hukum terhadap kreditor bahwa eksekusi terhadap suatu objek jaminan yang disengketakan dapat terjadi melalui lembaga parate eksekusi sesuai Pasal 6 dan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Hak Tanggungan. Dengan demikian akan menimbulkan pemahaman hukum mengenai legalitas pelaksanaan suatu parate eksekusi oleh kreditor.

Kata kunci: eksistensi, parate eksekusi, hak tanggungan